BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai kebijakan Pemerintah untuk mendorong Percepatan Pembangunan di Papua sudah diluncurkan. Yang paling mutakhir adalah Otonomi Khusus. Kebijakan yang disebut Baruabas Suebu, Mantan Gubernur Papua, sebagai kebijakan untuk "menyelesaikan masalah Papua dengan cara Papua" ini memberi wewenang kepada masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunannya sendiri sesuai dengan karakteristik adat dan kebudayaan mereka. Pasal 43 ayat (1) Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diuraikan pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui menghormati dan melindungi memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Wilayah Kota Jayapura masih tetap eksis memelihara keaslian budayanya dengan mempertahankan Struktur Pemerintahan Tradisional (Ondoafi) yang dijumpai saat ini. Dewasa ini di daerah Jayapura terdapat dua macam sistem pemerintahan. Sistem Pemerintahan Formal berupa Pemerintahan Kampung dan sistem Pemerintahan Non Formal yang disebut pemerintahan adat (tradisional). Pemerintah Kampung merupakan pemerintahan paling rendah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada dibawah pemerintahan Kecamatan/Distrik. Pemerintahan adat (tradisional) merupakan

pemerintah asli suku bangsa setempat (Jayapura) yang sudah ada sejak jaman purbakala secara turun-temurun.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, keinginan masyarakat adat Jayapura dalam hal pengembalian identitas kampung yang telah hilang sejak dipaksakannya struktur pemerintahan desa hasil politik pemberdayaan masa Orde Baru. Masyarakat meminta dukungan pemerintah terhadap penguatan kapasitas institusi Ondoafi/Ondofolo sesuai amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bag Provinsi Papua. Pengembalian sistem pemerintahan asli kampung intinya adalah kepala kampung atau kepala desa dijabat langsung oleh Ondoafi/Ondofolo. Dengan demikian kapasitas Ondoafi diperoleh melalui legitimasi hukum formal (Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), serta legitimasi melalui pengakuan masyarakat tentang eksistensi seorang Ondoafi sebagai kepala adat di setiap kampung.

Di Papua masih terdapat dan diakui dua Kepemimpinan. Kepemimpinan tersebut ada yang memiliki kekuasaan atas Jalur Formal dan ada yang muncul dalam suatu tradisi, Adat-istiadat dan Kebudayaan atau dilahirkan dalam tradisi adat di kenal dengan Kepemimpinan informal.

Dalam memperoleh pengakuan antar kedua pemimpin ini terdapat perbedaan Pengakuan atas keberadaan pimpinan formal didasarkan oleh tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Keterampilan dan juga sifat-sifat dan kemampuan memimpin yang dimilikinya. Sebaliknya Pengakuan atas keberadaan pemimpin informal diperoleh dari integritas pribadi yang di

milikinya seperti : Mengerti tentang adat-istiadat, dan agama, menjadi sosok panutan di dalam lingkungan kampung, sebagai juru damai, dan mencintai agama serta negerinya.

Karena merupakan bagian dan struktur pemerintahan Ondoafi yang telah teruji dan bertahan hingga saat ini. Pro dan kontra antara legitimasi Kepemimpinan Ondoafi dan Kepala Kampung perlu dilakukan dengan Merevitalisasi lembaga-lembaga yang dianggap mampu menyatukan kedua sistem pemerintahan ini yaitu pemimpin formal (kepala kampung) dan pemimpin informal (ondoafi) secara berkesinambungan di wilayah tersebut. Dengan demikian, guna memaksimalkan proses penyelenggaraan system pemerintahan serta mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kampung tidak hanya tergantung pada keputusan kepala kampung (pemimpin formal) saja, akan tetapi juga di ikut sertakan atas pertimbangan serta partisipasi dan ondoafi (pemimpin informal).

Pada konteks lokal di Papua umumnya dan Kota Jayapura pada khususnya terdapat stratifikasi social yang beragam. Stratifikasi social yang paling tinggi di tempati ondoafi. Ondoafi adalah pemegang garis keturunan yang di tank melalui garis lurus dengan pendiri kampung dan adalah anak laki-laki sulung ondoafi sebelumnya. Kekuasaan ondoafi secara turuntemurun.

Walaupun demikian telah diakui dalam garis kewenangan secara formal bahwa yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di kampung adalah kepala kampung. Kepala

kampung dalam menjalankan Kepemimpinan pemerintahan Kampung berada dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah yang berwenang terhadap penyelenggaraan pembangunan kampung. Kepala kampung sebagai wakil pemerintah, bertanggung jawab menjalankan administrasi pembangunan dan administrasi pemerintah kampung sesuai dengan tuntutan dan kebijakan pemerintah. Secara formal Kepala Kampung memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaaraan system pemerintahan kampung dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di kampung. Tetapi menurut batasan ulayat yang ada, ondoafi masih memegang penuh kewenangan atas potensi serta sumber daya alam yang terdapat dalam kawasan wilayah kampung.

Dengan demikian peranan pemimpin dalam pelaksana pembangunan di kampung, kepala kampung perlu menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan Kampung dengan melibatkan partisipasi Ondoafi agar dapat menunjang program pembangunan kampung. keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan kampung sangat di tentukan oleh pola dan gaya Kepemimpinan kepala Kampung dan Ondoafi, karena pola Kepemimpinan ini merupakan unsur penting yang mampu menunjang pelaksanaan aktivitas-aktivitas pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan di kampung.

Berdasarkan latar belakang yang disertai penjelasan-penjelasan diatas maka penulis tertarik dan berkeinginan mengadakan penelitian di lokasi Kampung Holtekamp, Kota Jayapura. Yang dituangkan dalam suatu judul penelitian yaitu: **"Dualisme Kepemimpinan Dalam Sinergitas Pembangunan Jembatan Di Kampung Holtekamp Kota Jayapura"**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

a. Masalah

Masalah merupakan bagian yang paling penting pada proses riset, sebab masalah memberikan pedoman jenis informasi yang nantinya akan di cari (Istijanto).

Pengertian tersebut diperkuat pula oleh Stoner dalam Sugiono (2000:35) bahwa masalah merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan merupakan penyimpangan yang terjadi antara yang seharusnya dan yang benar-benar terjadi yang menuntut manusia agar dapat mencari jalan keluar ataupun pemecahannya. Barangkali penting untuk menyimak dan sudut pandang masyarakat kampung mengenai system pemerintahan tradisional yang muncul dalam system pemerintahan kampung, karena adanya pola dualisme Kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah kampung, serta pola hidup masyarakat yang masih kental dengan system pemerintahan adat-istiadat yang telah turun-temurun terikat pada masyarakat, menyebabkan adanya kendala-kendala serta hambatan yang pasti sangat mempengaruhi proses pembangunan kampung.

Pola hidup tradisional serta system pemerintahan adat yang kian melekat membudidaya dalam proses pemilihan dan pembentukan pemimpin kampung masih sangat terhubung dengan ondoafi (pemimpin informal) karena anggapan masyarakat bahwa ondoafi merupakan

penguasa tertinggi dalam system pemerintahan adat yang di anut, dibanding dengan keberadaan kepala kampung sebagai pemimpin formal sukar untuk memaksimalkan tugas serta peran sebagai kepala pemerintah kampung karena adanya benturan antara nilai-nilai adat dalam system pemerintahan tradisional dengan system pemerintahan kampung yang menjadi system serta budaya Baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung.

Oleh sebab itu diperlukan adanya keseimbangan peran serta partisipasi kepala kampung selaku pemimpin formal dan ondoafi sebagai pemimpin informal, saling mendukung, mendampingi serta bekerja sama demi kepentingan serta terwujudnya pelaksanaan pembangunan kampung serta selaras dalam menyelenggarakan system pemerintahan di kampung. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis hanya membatasi pembahasan dengan lebih dikhususkan pada Aktivitas Kepemimpinan Formal dan Kepemimpinan Non Formal yaitu Kepala Kampung dan Ondoafi, dalam melaksanakan tugas serta fungsi masing-masing pemimpin.

Rumusan masalah pada hakikatnya adalah deskriptif tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi dan analisis variable yang tercakup di dalamnya. Dengan demikian rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan focus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya.

Berdasarkan permaslahan di atas, maka penulis merumuskan pembahasan dengan lebih di khususkan pada bagaimana Kepemimpinan

Kepala Kampung dan Kepemimpinan Ondoafi, dalam melaksanakan tugas serta fungsi masing-masing?

b. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan di atas, maka selanjutnya penulis membatasi pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut;

- 1. Bagaimana bentuk sinergitas ?
- 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam sinergitas tersebut?
- Apa sajakah bentuk hubungan kerja sama antar ke dua pemimpin formal dan non formal dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kampung Holtekamp.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- Mengetahui bentuk-bentuk sinergitas dari kedua kepemimpinan formal dan informal.
- Mengetahui masalah-masalah apa saja yang muncul pada sinergitas tersebut.

Kegiatan penelitian ini bertujuan pada masalah mendasar dan penelitian ini, maka dapat diformulasikan bahwa tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

a) Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Kepemimpinan Formal dan Kepemimpinan Informal dalam Sinerjitas Pembangunan kampung.

b) Untuk mengetahui factor-faktor apa sajakah yang mempengaruhui adanya Dualisme Kepemimpinan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

- Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana latihan dalam menuangkan gagasan dan pikiran yang di peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program studi Ilmu pemerintahan.
- 2. Disadari bahwa dalam penelitian ini analisisnya hanya akan memberikan informasi yang sifatnya spesifik dan terbatas pada obyek studi yang dikaji dengan waktu yang terbatas, namun dengan adanya penelitian dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam rangka pengembangan pengetahuan tentang system serta pola kepemimpinan tradisional berdasarkan adatistiadat yang masih membudidaya dalam kehidupan masyarakat asli Papua, kampung-kampung (Port Numbay) di sekitar Kota Jayapura, lebih khususnya Kampung Holtekamp Kota Jayapura dan diharapkan penelitian ini sebagai kajian untuk pemerhati masalah sejenis untuk diteliti lebih lanjut di tempat yang sama atau berbeda.

b. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi suatu temuan kasus, yang dapat di jadikan bahan acuan di waktu mendatang.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah kampung dalam memberlakukan berbagai kebijakan terkait pelaksanaan system pemerintahan tingkat kampung.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyoroti dua variable yaitu :

Variable I adalah : Dualisme Kepemimpinan yaitu variabel Independent

(variabel bebas) dan Variabel II adalah Pembangunan Kampung variabel

Dependent (variabel terikat).

1. Pengertian Dualisme Kepemimpinan

- Kepemimpinan formal
- Kepemimpinan informal

1.1 Pengertian Dualisme

Dualisme (dualisme) berasal dan kata latin yaitu duo (dua). Dualisme adalah ajaran yang mengatakan realitas itu terdiri dari dua substansi. Dalam pandangan antara jiwa dan raga.

Menurut Muhammad Ali, dualisme

"Ajaran yang berdasar atas dua asas yang bertentangan yang sifatnya mendua atau cara yang berdasar atas dua hal yang bertentangan"

Menurut Bachirani Sanusi (2004)

"Dualisme merupakan himpunan masyarakat yang memungkinkan pihak yang termasuk superior dan inferior hidup berdampingan di suatu tempat yang sama".

Dari beberapa pengertian di atas dapat di tank kesimpulan bahwa Dualisme merupakan ajaran/aliran/faham yang memandang atas alam ini terdiri atas dua macam hakekat yang berbeda, masing-masing bebas berdiri sendiri dengan wewenang yang sama dan saling berdampingan dan hakekat itu ada dalam diri manusia. Hubungan antara keduanya menciptakan suatu bentuk lingkungan kerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

1.2 Pengertian Pemimpin

Menurut Abmad Rusli (Kepemimpinan Dalam Penddikan 1999).

"Pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin pengikutnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai".

Menurut Matha Thoha (Buku perilaku organisasi 1983:255)

"Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya".

Menurut Kartini Kartono (1994, 33)

"Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu at&t beberapa tujuan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat di tank suatu kesimpulan bahwa; Pemimpin adalah seseorang/individu yang memiliki kemampuan sikap, tanggung jawab serta memiliki suatu kelebihan dalam suatu bidang tertentu, yang mampu mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti aktivitas-aktivitas tertentu secara bersama-sama, guna mencapai tujuan yang diinginkan".

1.3 Pemimpin Formal (Kepala kampung)

Pemimpin formal pada umumnya berstatus resmi dan didukung oleh peraturan-peraturan yang tertulis serta keberadaannya melalui proses pemilihan dan pengangkatan secara resmi. Pemimpin formal adalah orang yang menjadi pemmpin karena "legaitas"nya. Karena telah memenuhi semua peraturan yang ada.

1.4 Pemimpin Non Formal (Ondoafi)

Pemimpin Non Formal adalah orang yang berada dalam kedudukan social tertentu, yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan wewenang yang sah dan diakui oleh masyarakat dalam lingkungan kekuasaan yang di pimpin yang berdasarkan kebudayaan dan adatistiadat.

2. Pengertian Kepemimpinan

Menurut Tead, Terry: Hogt (dalam Kartono 2003)

"Kepemimpinan merupakan kegiatan/seni mempengaruhi orang lan agar mau bekerja sama yang di dasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang di inginkan".

Menurut Yong (Kartono 2003)

"Kepemimpinan ialah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang di inginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok".

2.1 Kepemimpinan Formal

Kepemimpinan formal merupakan jabatan yang di memiliki seseorang dalam kememampuanya mengikuti proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotvasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Di mana Kepemimpinan formal dalam jabatannya di peroleh dan suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya.

Kepemimpinan formal secara langsung merupakan jaminan bahwa seseorang yang secara formal di angkat menjadi pemimpin, berhak memimpin organisasi yang berada di bawah pegawasan pemerintah. Penerimaan atas Kepemimpinan formal masih harus di uji dalam praktek dan hasilnya akan terlihat dalam kenyataan hidup organisasi.

2.2 Kepemimpinan non formal

Kepemimpinan informal merupakan jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan tertentu, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Di mana kepemimpinan non formal dalam jabatannya di peroleh tanpa suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya.

Kepemahaman Dua Kepemimpinan

Kepemahaman dua kepemimpinan adalah ajaran atau aliran/faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakekat yaitu hakekat materi dan hakekat rohani. Kedua macam hakekat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama azazi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakekat ini adalah terdapat dalam diri manusia.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah yang mempelajari Kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada

seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dan peranya memberikan pengajaran/instruksi.

Seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang berwibawa, tegas, bertanggung jawab atas segala kewajibannya yang harus ia lakukan, disiplin, dan bisa membimbing bawahannya. Tetapi, terkadang seorang pemimpin jika sedang jaya, ia lupa dengan sifat kewibawaannya dan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang idealis ialah seorang yang memiliki sifat-sifat yang cenderung baik dan dapat memimpin dengan bertanggung jawab. Sekarang ini jarang menemukan pemimpin seperti itu, karena kebanyakan pemimpin cenderung memikirkan dirinya sendiri tidak bertanggung jawab dengan bawahan yang ia pimpin. Tapi masih banyak pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang baik seperti itu.

Dualisme Kepemimpinan yang di maksud dalam pembahasan ini lebih ditujukan pada Kepemimpinan formal (kepala kampung) dan Kepemimpinan informal (Ondoafi/ondofolo).

Kepemimpinan Formal ada secara sah dan resmi pada seseorang yang di angkat dalam suatu jabatan tertentu berdasarkan aturan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepemimpinan Formal secara Langsung merupakan jaminan bahwa seseorang yang secara Formal di angkat menjadi pemimpin dan memiliki wewenang memimpin organisasi yang berada di bawah pengawasan Pemerintah.

Keberadaan Kepemimpinan Formal akan selalu menjadi penilaian yang sangat objektif dan masyarakat yang dipimpinnya karena masih harus di uji dalam praktek dan hasilnya akan terwujud dalam kenyataan hidup organisasi.

Kepemimpinan Informal tidak didasarkan atas pengangkatan berdasarkan ketentuan yang resmi yang di tetapkan oleh pemerintah secara formal serta memiliki bagan organisasi khusus berdasarkan bagan pemerintah adat setempat.

Efektivitas Kepemimpinan Informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek Kepemimpinan seseorang dalam masyarakat, sehingga Pemimpin Informal merupakan orang yang berada dalam kedudukan social tertentu mempunyai kemempuan, kekuasaan dan wewenang yang sah dan diakui oleh sejumlah orang dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaan adat tertentu.

Peranan Kepemimpinan

Kepemimpinan yang merupakan proses yang melibatkan berbagai dimensi akan dapat menghasilkan berbagai kondisi yang merugikan atau menguntungkan organisasi. Dengan demikian, diperlukan penelitian mengenai efektivitas Kepemimpinan. Hal ini ditegaskan oleh Stoner (dalam Prabowo, 2005 : 50) yang berpendapat bahwa terdapat tiga aspek dalam Kepemimpinan, yaitu: 1) pembagian kekuasaan yang tidak sama antara pemimpin dan yang dipimpin, 2) penggunaan segala bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi anak buah, dan 3) dalam prosesnya

melibatkan orang lain. Namun demikian, untuk mencapai Kepemimpinan yang sempurna harus memenuhi syarat potensi yang tercakup dalam arti Kepemimpinan. Peranan pemimpin atau Kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ada tiga, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Siagian (dalam Brahmasari, 2008: 102) berikut:

Peranan yang bersifat interpersonal

Peranan yang bersifat interpersonal mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan keberadaan organisasi, pemimpin tersebut bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan dan seorang pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung.

Peranan yang bersifat informasional

Peranan yang bersifat informasional mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisasi bersifat pemberi, penerima, dan penganalisis informasi.

Peran pengambilan keputusan.

Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan diambil, yaitu berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan inovasi; mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi; dan menjalankan usaha secara konsisten. Gibson, *et al*, (dalam Anwar, 2005: 126) menjelaskan hubungan antara sifat pemimpin, perilaku pemimpin, variabel situasional, dan efektivitas organisasi dalam

sebuah model. Efektivitas diukur dengan beberapa indikator, yaitu kepuasan kerja, produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, daya saing, dan pengembangan.

Model tersebut menjelaskan bahwa perilaku pemimpin dipengaruhi oleh sifat pemimpin dan berhubungan timbal balik dengan variabel situasional. Model tersebut juga menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin dan variabel situasional terhadap efektivitas organisasi. Anoraga, et al., (dalam Brahmasari, 2008 : 110) mengemukakan bahwa terdapat sembilan peranan Kepemimpinan seseorang dalam organisasi, yaitu pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijakan, pemimpin sebagai ahli, pemimpin sebagai pelaksana, pemimpin sebagai pengendali, pemimpin sebagai pemberi hadiah atau hukuman, pemimpin sebagai teladan dan lambang atau simbol, pemimpin sebagai tempat menimpakan segala kesalahan, dan pemimpin sebagai pengganti peran anggota lain.

1. Pembangunan Kampung

a. Pengertian Pembangunan

Menurut Dissaynak, (1984)

Pembangunan merupakan proses perubahan social yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan cultural tempat mereka berada dan berusaha menegakkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini yang menjadikan mereka penentu dan tujuan mereka sendiri.

Menurut Siagian (1994)

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan di lakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Ginanjar Kartasasmita

Pembangunan yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan secara terencana.

Dari penjelasan definisi-definisi di atas dapat di tank suatu kesimpulan bahwa Pembangunan Kampung merupakan keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di lokasi kampung, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu pembangunan kampung tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan integral dan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Karena keberhasilan pembangunan kampung, merupakan tolak ukur pembangunan daerah clan pembangunan nasional.

b. Pengertian Kampung

Menurut R. Bintarto. (1977)

Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Sutarjo Kartohadikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendini merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Paul Andis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dan 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

Menurut UU No 5 Tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat di tank suatu kesimpulan bahwa Pembangunan kampung merupakan keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di lokasi kampung, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu pembangunan kampung tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan integral dan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Karena keberhasilan pembangunan kampung, merupakan tolak ukur pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

Konsep mempunyai arti lain yaitu suatu rancangan kasar dalam membuat suatu penulisan. Konsep dapat juga di sebut sebagai generalisasi dan sekelompok gejala tertentu sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala yang ada. Dengan konsep, maka penulis

dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan suatu pengertian yang di rumuskan sebagai berikut:

a. Kepemimpinan formal (Kepala Kampung)

Kepemimpinan formal merupakan jabatan yang di memiliki seseorang dalam kemampuannya mengikuti proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan organisasi, memotvasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Di mana Kepemimpinan formal dalam jabatannya di peroleh dan suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya.

Kepemimpinan formal secara langsung merupakan jaminan bahwa seseorang yang secara formal diangkat menjadi pemimpin, berhak memimpin organisasi yang berada di bawah pegawasan pemerintah.

b. Kepemimpinan Informal (Ondoafi)

Kepemimpinan informal merupakan jabatan yang dimiliki seseorang dalam kemampuannya meliputi proses mempengaruhi orang lain dalam menentukan tujuan tertentu, memotifasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Di mana kepemimpinan non formal dalam jabatannya diperoleh tanpa suatu usaha tertentu dalam pencapaiannya.

c. Pembangunan Kampung

Pembangunan kampung merupakan keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di lokasi kampung, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu pembangunan

kampung tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan integral dan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Karena keberhasilan pembangunan kampung, merupakan tolak ukur pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

2. Definisi Operasional

- a. Indikator dualisme Kepemimpinan yaitu:
 - a) Hubungan kerjasama antar pemimpin formal dan pemimpin informal
 - b) Peranan pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan kampung
 - c) Partisipasi aktif dari pemimpin
 - d) Keterbukaan antara ke dua pemimpin.
 - e) Keseimbangan dan kesetaraan peran dalam Kepemimpinan
- b. Indikator Pembangunan Kampung meliputi:
 - a) Seberapa jauh peran kepala kampung dan ondoafi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di kampung.
 - b) Seberapa jauh masyarakat dalam mengetahui dan mengoreksi dana operasional pembangunan kampung.
 - Seberapa jauh kewenangan masyarakat dalam mendeteksi dan mengoreksi kinerja pemerintah kampung.
 - d) Seberapa jauh keikutsertaan masyarakat desa dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik, saran, maupun masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

e) Seberapa jauh partisipasi masyarakat desa dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian sangat penting dalam proses pencapaian tujuan dan suatu penelitian, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya di lakukan berdasarkan suatu tuntutan agar dapat mempermudah dalam mencapai efektifitas penelitian itu sendiri. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian dengan tujuan menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, penelitian ini menggunakan metode deskripsi. Menurut Wiranto Surachman (1980 : 1390). Deskripsi adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang actual dengan jalan mengumpulkan data-data mengumpul dan menganalisa serta menginterprestasikannya.

Maka metode Deskriptif dalam penelitian ini yaitu mengetahui gambaran perbandingan Kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Kampung dan Ondoafi dalam pelaksanaan Pembangunan kampung, di Kampung Holtekamp Kota Jayapura Papua.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura khususnya di Lingkungan/Badan (Instansi) yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan kampung studi tentang perbandingan Kepemimpinan Kepala Kampung dan Ondoafi khususnya di Kampung Holtekamp Kota Jayapura. Alasan dipilihnya lokasi ini karena berkaitan dengan dengan objek permasalahan, selain itu untuk dapat mempermudah penulis dalam menjaring data dan informasi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2006:90) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan menurut DR. Revassy Lazarus (2008:25) populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat penelitian, yang dan padanya terkandung informasi yang ingin diketahui.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu dan suatu masalah yang diteliti untuk dipelajani kemudian dibuat kesimpulan.

Dengan demikian populasi dalam penelitian in Maka yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian adalah kepala kampung, sekretaris Kampung Ondoafi dan kelompok pemerintah Kampung dan para warga asli Kampung Holtekamp, dengan jumlah keseluruhan 10 Orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan pedoman di atas, maka sampel yang diambil berjumlah 10 sumber data, meliputi:

- 1) 1 Pemimpin Formal (Kepala Kampung Holtekamp)
- 2) 1 Badan Musyawarah Kampung (Sekretaris Kampung
- 3) 1 Pemimpin Non Formal (Ondoafi Kayo pulau)
- 4) 7 Orang Warga Kampung Kayo pulau

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebelum penelitian lapangan dengan studi pustaka dengan menggunakan teknik ini dapat di ketahui sumbersumber yang dapat mendasari pencarian fakta di lapangan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan penelaah terhadap dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. misalnya, Undang-undang, kamus, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta karya ilmiah dibidang system pemerintahan yang dibuat oleh para ahli pemerintahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan peneliti dalam penelitian guna menyusun skripsi ini ada empat (4) cara yaitu dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk Tanya jawab dengan responden secara langsung. Wawancara yang dilakukan disertai pedoman wawancara terarah (Directive Interview) agar wawancara tersebut lebih terstruktur dan sistematis.

2. Observasi

Teknik Observasi yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu Kampung Holtekamp Kota Jayapura.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yang di gunakan adalah dengan cara data dan informasi dalam penulisan skripsi ini dapat di peroleh dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi. Catatan-catatan, Surat-surat dan kebijakan-kebijakan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Angket/Kuisioner

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket/kuisioner. Angket merupakan alat pengumpulan data yang biasa digunakan dalam

teknik komunikasi tak langsung. Artinya, responden secara tidak langsung dihubungi melalui daftar pertanyaan tertulis yang dikirim dengan media tertentu. (Wasito, 1992:74).

Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang di bagikan kepada sejumlah besar orang untuk di isildi jawab tanpa bantuan langsung dan orang membuat daftar pertanyaan dengan maksud memperoleh bahan-bahan tertentu terhadap suatu masalah (Hadi 1972:233).

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data merupakan Data yang telah terkumpul dalam tahap pengumpulan data, perlu diolah dahulu. Tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi, untuk kemudian dianalisis.

Dalam tahap pengelolaan data ini, ada tiga kegiatan yang akan dilakukan yaitu: penyuntingan (editing), pengkodean (coding), dan tabulasi (tabulating).

a. Editing

Adalah pemeriksaan data yang telah diperoleh dan responden, guna menentukan kepastian data serta relevansi jawaban untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dan responden dipakai atau tidak.

b. Coding

Adalah pengkodean setelah pemeriksaan data selesai, selanjutnya dibuat kiasifikasi jawaban dalam kategori menurut jenis-jenis yaitu pemberian kode ke dalam kategori yang sama.

c. Tabulating

Setelah kegiatan mengklasifikasi data, dilanjutkan dengan menyusun data (yang telah diolah) ke dalam bentuk tabel, kemudian dibuat suatu tabel rangkuman yang memuat data berdasarkan masing-masing indicator. Hal ini akan memudahkan dalam memahami data-data terutama untuk proses analisis data. Untuk menghitung presentase dalam setiap tabel frekuensi, penulis menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentasi

F = Frekuensi

N = Nilai Konstan

6. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisa kualitatif yang didukung dengan analisa kuantitatif. Untuk mempermudah analisa data in penulis melakukan penyederhanaan kategori jawaban responden dengan cara mengklasifikasikan jawaban yang ada. Dimana untuk kategori jawaban sangat, sering atau baik dinilai baik. Sedangkan untuk kategori jawaban jarang atau kurang baik, namun

semuanya disesuaikan dengan kualitas pertanyaan dan jawaban yang ada. Selanjutnya penganalisasian dilakukan dengan mendeskripsikan variablevariable yang diteliti dalam bentuk uraian kata-kata (naratif) dengan berpatokan pada catatancatatan wawancara tak terstruktur maupun wawancara terstruktur serta pengamatan lapangan.